

ISU Sepekan

BIDANG EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Minggu ke-1 Bulan Maret 2021

(tanggal 26 Februari s.d. 4 Maret)



**Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI**

PENINGKATAN ALOKASI ANGGARAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) UNTUK MENDORONG PEREKONOMIAN NASIONAL

Edmira Rivani

Peneliti Madya/Kebijakan Ekonomi

edmira.rivani@dpr.go.id



ISU ATAU PERMASALAHAN

Hanya dalam waktu dua bulan pada tahun 2021, pemerintah telah menaikkan pagu anggaran program PEN untuk kelima kalinya. Anggaran pemulihan tersebut dinaikan hampir dua kali lipat dibandingkan dengan yang ditetapkan dalam UU APBN 2021. Semula, anggaran pemulihan tersebut sebesar Rp372,3 triliun dan kini menjadi Rp699,4 triliun. Anggaran PEN 2021 difokuskan pada lima bidang, yakni kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, dan insentif usaha, serta dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi.

Kenaikan alokasi pagu anggaran tersebut dilatarbelakangi oleh proyeksi pemerintah terhadap program vaksinasi Covid-19 yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Semula pemerintah meyakini program vaksinasi bisa dilaksanakan pada kuartal IV-2020. Ternyata, program vaksinasi baru bisa dilaksanakan pada pertengahan Januari. Dengan demikian, proyeksi pemulihan ekonomi akibat pandemi ini akan menempuh jalan terjal. Salah satu penyebabnya adalah kinerja penyaluran stimulus program PEN pada tahun lalu dinilai belum efektif. Dari alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 695,2 pada tahun 2020, sampai di penghujung tahun 2020 penyalurannya belum seluruhnya terealisasi. Sampai 31 Desember 2020, penyalurannya baru mencapai 83,4% atau senilai Rp 579,78 triliun dari total anggaran yang dialokasikan.

Kenaikan dua kali lipat alokasi anggaran program ini tentu dinilai masih *feasible* ditinjau dari sisi besaran total PDB nasional. Alokasi anggaran PEN pada tahun 2020 hanya 4,2% dari total PDB dan nilai ini jauh lebih kecil jika dibandingkan, misalnya dengan India dan Turki yang masing-masing mengalokasikan dana stimulus Covid-19 sebesar 10% dan 12,8% dari total PDB mereka. Hasilnya, dengan rasio stimulus yang lebih besar tersebut, kedua negara itu mampu membalikkan perekonomiannya lebih cepat daripada Indonesia. Ekonomi India meningkat 16,4% dari tingkat pertumbuhan -23,9% pada kuartal II 2020 menjadi -7,5% pada triwulan selanjutnya. Sementara itu, perekonomian Turki meningkat 26,4% dari tingkat pertumbuhan -10,8% pada kuartal II 2020 menjadi 15,6% pada kuartal selanjutnya. Kinerja perekonomian Indonesia mengalami situasi sebaliknya, ekonomi nasional hanya meningkat 1,83% dari tingkat pertumbuhan -32% pada kuartal II 2020 menjadi -3,49% pada kuartal III 2020.



FUNGSI DPR

Anggaran:

Besarnya skala kenaikan alokasi anggaran untuk program PEN pada APBN 2021 menjadi tantangan pengelolaannya. Dengan demikian, untuk memperkuat akuntabilitas politik pelaksanaan fungsi anggaran DPR, lembaga ini harus berupaya memastikan lima bidang yang menjadi fokus anggaran PEN dapat dikelola secara optimal, efektif, dan efisien untuk mendorong pemulihan perekonomian nasional.

Pengawasan:

1. Melakukan review atas realisasi anggaran PEN 2020 secara ketat dan terukur.
2. Meminta penjelasan kepada pemerintah atas efektivitas pengelolaan alokasi anggaran program PEN tahun 2020.
3. Hasil evaluasi ini harus menjadi rujukan pemerintah untuk merancang kebijakan yang lebih matang. Untuk itu, upaya perbaikan seperti integrasi data, mekanisme penyaluran, serta optimalisasi dan percepatan penyerapannya harus segera diimplementasikan.



ATENSI DPR RI

Dengan besaran anggaran yang meningkat di tahun 2021, maka implementasi dan efektivitas program pemulihan menjadi tantangan besar yang harus direspons secara serius oleh pemerintah. Argumennya, anggaran yang besar belum tentu secara otomatis akan meningkatkan konsumsi, selama pandemi masih belum mereda. Apalagi fokus pemerintah kali ini ditujukan untuk pemulihan sektor usaha seperti UMKM dan korporasi. Oleh karena itu, peningkatan besaran anggaran PEN ini harus diiringi dengan upaya perbaikan penyalurannya secara ketat dan terukur. Dukungan dan pengawasan DPR juga diperlukan dalam proses percepatan penyerapannya baik dari efektivitas dan efisiensinya.



SUMBER

Media Indonesia, 25 Februari 2021; Republika, 24 Februari 2021; Media Indonesia, 24 Februari 2021

